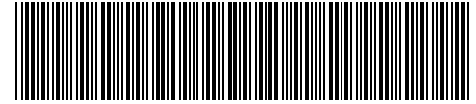




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.632437/2025**



DS:8704-7970-8350-1001

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
  2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
  3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
  4. Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN
- Sebesar : Rp. 47.498.997.000 ( EMPAT PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN  
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	47.498.997.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 47.498.997.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025**



DS:8704-7970-8350-1001

Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

---

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	47.498.997.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	444.021.000
DR.4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Rp.	9.341.955.000
DR.4118	Intelijen Obat dan Makanan	Rp.	6.639.148.000
DR.4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	Rp.	6.522.525.000
DR.6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Rp.	24.551.348.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	47.498.997.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	444.021.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
	: 3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
	: 5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
	: 10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
	: 11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
	: 13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
	: 20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 22. 07	Persentase UMKM yang memenuhi standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.BKB	Pemantauan produk	4,00	laporan	444.021.000
Rincian Output		:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	4.00	laporan	444.021.000
Kegiatan		:	4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			9.341.955.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4117.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.766.445.000
Rincian Output		:	01 ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	21.00	Rekomendasi Kebijakan	5.266.445.000
		:	02 ABG.002	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4.00	Kajian	3.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4117.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	15,00	Paket, Unit	106.821.000
Rincian Output		:	01 CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15.00	Unit	106.821.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4117.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	97,00	Unit	468.689.000
Rincian Output		:	01 CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	97.00	Unit	468.689.000
Kegiatan		:	4118	Intelijen Obat dan Makanan			6.639.148.000
		:	1. 01	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4118.BKB	Pemantauan produk	40,00	laporan	6.639.148.000
Rincian Output		:	01 BKB.001	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14.00	laporan	2.969.620.000
		:	02 BKB.002	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	6.00	laporan	2.219.829.000
		:	03 BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	20.00	laporan	1.449.699.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			6.522.525.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan Yang Dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan				
		2. 02	Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM				
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4134.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	5,00	Perkara, Berkas Perkara	4.500.532.000
Rincian Output	:	01	QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I (PN)	5,00	Perkara	4.500.532.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4134.QKB	Pemantauan produk	17,00	laporan, Berkas Perkara	2.021.993.000
Rincian Output	:	01	QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan (PN)	17,00	laporan	2.021.993.000
Kegiatan	:	6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			24.551.348.000	
	:	1. 01	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan				
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6386.BKB	Pemantauan produk	17,00	laporan	7.066.995.000
Rincian Output	:	01	BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	17,00	laporan	7.066.995.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6386.QKB	Pemantauan produk	4,00	laporan	17.484.353.000
Rincian Output	:	01	QKB.002	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4,00	laporan	17.484.353.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	47.498.997.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	47.498.997.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



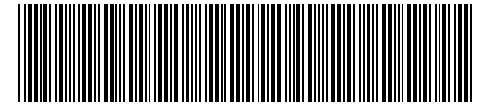
DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632437	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	-	29.583.487	17.915.510	-	-	47.498.997		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	29.583.487	17.915.510	-	-	47.498.997		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	444.021	-	-	-	444.021		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	444.021	-	-	-	444.021	01 . 51	
01	RM	-	444.021	-	-	-	444.021	175@	
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	-	8.766.445	575.510	-	-	9.341.955		
4117.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.766.445	-	-	-	8.766.445	01 . 51	
01	RM	-	8.766.445	-	-	-	8.766.445	175@	
4117.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	106.821	-	-	106.821	01 . 51	
01	RM	-	-	106.821	-	-	106.821	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	468.689	-	-	468.689	01 . 51	
01	RM	-	-	468.689	-	-	468.689	175	
<b>4118</b>	<b>Intelijen Obat dan Makanan</b>	-	<b>6.639.148</b>	-	-	-	<b>6.639.148</b>		
4118.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.639.148	-	-	-	6.639.148	01 . 51	
01	RM	-	6.639.148	-	-	-	6.639.148	175@	
<b>4134</b>	<b>Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan</b>	-	<b>6.522.525</b>	-	-	-	<b>6.522.525</b>		
4134.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.500.532	-	-	-	4.500.532	01 . 51	
01	RM	-	4.500.532	-	-	-	4.500.532	175@	
4134.QKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.021.993	-	-	-	2.021.993	01 . 51	
01	RM	-	2.021.993	-	-	-	2.021.993	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	-	7.211.348	17.340.000	-	-	24.551.348		
6386.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.726.995	340.000	-	-	7.066.995	01 . 51	
01	RM	-	6.726.995	340.000	-	-	7.066.995	175	
6386.QKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	484.353	17.000.000	-	-	17.484.353	01 . 51	
01	RM	-	484.353	17.000.000	-	-	17.484.353	175@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>29.583.487</b>	<b>17.915.510</b>	-	-	<b>47.498.997</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	3.400.000	5.100.000	340.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	17.340.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632437] DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>632437</b>	<b>DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN</b>		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 29.020.027	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 12.020.027		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
	53 Belanja Modal Rp. 17.000.000		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
<b>063.01.DR</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
<b>3165</b>	<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
<b>3165.BKB</b>	<b>Pemantauan produk</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.387.438
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.201		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.800
<b>4117</b>	<b>Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan</b>		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
<b>4117.ABG</b>	<b>Kebijakan Bidang Kesehatan</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.370		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 440.640
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.663.730
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 312.000
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	<b>4118</b>	<b>Intelijen Obat dan Makanan</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.000	<b>4118.BKB</b>	<b>Pemantauan produk</b>
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		521211 Belanja Bahan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.669

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632437] DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 754.675
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.000	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.295
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.321.265	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 102.220
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.210	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 374.020
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 305.641	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 942.050		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	<b>4134.QKB</b>	<b>Pemantauan produk</b>
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 306.425
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 102.100		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
<b>4134</b>	<b>Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.985
			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
<b>4134.QCD</b>	<b>Perkara Hukum Badan Usaha</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632437] DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6386 6386.QKB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.580 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.360 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.560 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	6386 Pemantauan pelanggaran hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.800 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Pemantauan produk</b>		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.000.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.849 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.600 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.400 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.144 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632437/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:8704-7970-8350-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632437] DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503